

**PERSEPSI GURU TENTANG PELAKSANAAN PERAN KOMITE DI SMP
NEGERI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan*



OLEH:

**RIO PUTRA GENI
1204519/2012**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

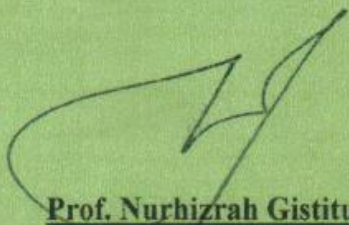
**PERSEPSI GURU TENTANG PELAKSANAAN PERAN KOMITE
DI SMP NEGERI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NAMA : RIO PUTRA GENI
NIM : 1204519
TAHUN MASUK : 2012
JURUSAN : ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS : ILMU PENDIDIKAN

Padang, Agustus 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed, Ed.D
NIP. 19580325 199403 2 001

Pembimbing II



Dra. Elizar Ramli, M. Pd
NIP. 19550203 198602 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

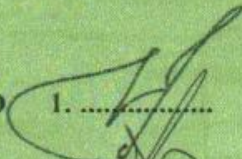
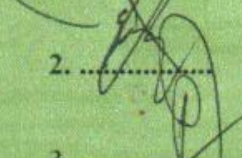
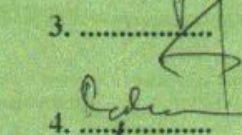
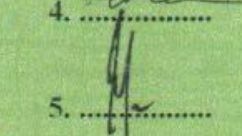
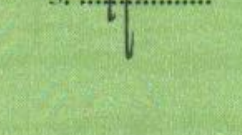
Dinyatakan lulus Setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

PERSEPSI GURU TENTANG PELAKSANAAN PERAN KOMITE DI SMP NEGERI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAMA : RIO PUTRA GENI
NIM/BP : 1204519 / 2012
PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN : ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS : ILMU PENDIDIKAN

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed, Ed.D	1. 
Sekretaris	: Dra. Elizar Ramli, M.Pd	2. 
Anggota	: Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd	3. 
Anggota	: Dr. Hadiyanto, M.Ed	4. 
Anggota	: Dr. Rifma, M.Pd	5. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2016
Yang menyatakan,



Rio
RIO PUTRA GENI
NIM 1204519/2012

ABSTRAK

Judul : Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

Penulis : Rio Putra Geni
1204519/2012

Pembimbing : 1. Prof. Nurhizrah Gistituati, M. Ed, Ed. D
2. Dra. Elizar Ramli, M.Pd

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yang menunjukkan tentang pelaksanaan peran komite sekolah yang kurang terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah (1) Seperti apa Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging. (2) Seperti apa Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan pendukung di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging. (3) Seperti apa Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan pengontrol kegiatan layanan pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging. (4) Seperti apa Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan mediator/penghubung di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah guru SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging yang berjumlah 110 orang. Dan besar sampel ditentukan dengan teknik *stratified Proportional random sampling* berjumlah 48 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket model skala likert dengan lima alternatif jawaban yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Pertimbangan sudah terlaksana dengan cukup baik (3,32). (2) Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Pendukung kegiatan sudah terlaksana dengan cukup baik (3,23). (3) Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Pengontrol kegiatan sudah terlaksana dengan cukup baik (3,35). (4) Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Penghubung/mediator atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sudah terlaksana dengan cukup baik (3,45). Jadi secara umum persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging berada ada kategori cukup baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuliskan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite Sekolah pada SMP Negeri di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Nurhizrah Gistituati, M. Ed. Ed. D selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Elizar Ramli, M.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang beserta Pembantu Dekan.
3. Ibu Dra. Anisah, M.Pd dan Bapak Dr. Hanif Al Kadri M. Pd selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan.
4. Staf dosen beserta karyawan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaan yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ditempatnya.
6. Segenap Majelis Guru SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging yang telah bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
7. Orang tua yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik materil maupun moril dalam menyelesaikan studi S1.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberi dukungan, saran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu disini.

Semoga bimbingan dan petunjuk yang diberikan menjadi amal saleh bagi bapak dan ibu serta mendapat balasan yang setimpal dari sisi Allah SWT. Amin. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritikan dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Padang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi Masalah	4
C.Pembahasan Masalah.....	5
D.Perumusan Masalah.....	5
E.Pertanyaan Penelitian.....	6
F.Tujuan Penelitian	6
G.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A.Pengertian Persepsi	9
B.Pengertian Komite Sekolah	10
C.Peran Komite Sekolah	18
1. Sebagai Badan Pertimbangan	18
2. Sebagai Badan Pendukung	21
3. Sebagai Badan Pengontrol.....	23
4. Sebagai Badan Penghubung/Mediator.....	25
D.Kerangka Konseptual	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A.Jenis Penelitian	30
B.Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
C.Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
D.Jenis dan Sumber Data	34
E.Instrumen Penelitian	35
F.Teknik Pengumpulan Data.....	37
G.Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian.....	40
1. Peran Komite Sebagai Badan Pertimbangan	40
2. Peran Komite Sebagai Badan Pendukung	42
3. Peran Komite Sebagai Badan Pengontrol.....	43
4. Peran Komite Sebagai Badan Penghubung/Mediator	44
5. Rekapitulasi	46
B.Pembahasan	47

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan.....	52
B.Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	59
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Populasi Penelitian	31
Populasi Berdasarkan Golongan	32
Hasil Perhitungan Sampel Penelitian	34
Penyebaran Sampel Berdasarkan Golongan	34
Perepsi Guru Tentang Peran Komite Sebagai Badan Pertimbangan	41
Perepsi Guru Tentang Peran Komite Sebagai Badan Pendukung.....	42
Perepsi Guru Tentang Peran Komite Sebagai Badan Pengontrol	44
Perepsi Guru Tentang Peran Komite Sebagai Badan Penghubung.....	45
Rekapitulasi Skor Rata-Rata	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen	59
Lampiran 2 Angket Penelitian	61
Lampiran 3 Data Mentah Analisis Uji Coba.....	67
Lampiran 4 Hasil Uji Coba Penelitian	68
Lampiran 5 Data Mentah Hasil Penelitian	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan ujung tombak untuk mencerdaskan anak bangsa, maka dari itu pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataannya belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001:2)

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) yakni komite sekolah melalui keputusan menteri pendidikan nasional No : 044/U/2002 tanggal 2 april 2002. Pengantian nama BP3 mejadi komite sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud materil saja, namun

juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Komite sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional NO/044/U/2002 Tanggal 2 april 2002 dalam ketusan mendiknas tersebut dinyatakan bahwa peran dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan : (1) *advisory agency* (pemberian pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *contoling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat (Suyardi, 2003). Komite sekolah merupakan mitra Sekolah dalam upaya membangun komitmen dan loyalitas serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Komite sekloah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah, maka oleh para kelompok-kelompok yang berkepentingan dibentuk komite. Depdiknas (2002:13) mengatakan komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit atau non politis dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses hasil pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa peran komite disekolah mempunyai peran yang sangat penting /dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap satuan pendidikan, baik sebagai pemberi masukan, dukungan pengontrol maupun sebagai mediator. Oleh sebab itu komite sekolah harus dapat melaksanakan perannya dengan baik dan maksimal agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Kenyataan dilihat dilapangan dari pengamatan peneliti pada SMP Negeri di kecamatan Sungai Geringging kurang terlaksana sebagai mana mestinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti bersama beberapa orang guru dan lkepala sekolah pada tanggal 13-15 April 20016. Peneliti melihat di lapangan beberapa fenomena seperti (1) komite jarang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pihak sekolah yang akan dilaksanakan seperti: adanya kebijakan sekolah dalam menyangkut biaya dari siswa tanpa adanya msyawarah anantara walimurid dan pihak sekolah melalui komite (2) komite jarang melakukan tindak lanjut dari aspirasi orang tua siswa/ masyarakat seperti biaya siswa di sekolah (3) komite datang kesekolah hanya pada saat rapat mengenai keuangan sekolah seperti menandatangani hasil rapat sekolah (4) kurangnya dukungan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperi sekolah kekurangan staf pengajar komite tidak mencarikan solusinya.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti akan meneliti secara mendalam seperti apa: **“Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran**

Komite Sekolah pada SMP Negeri di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman”

B. Identifikasi Masalah

Sebagai badan organisasi yang bertugas sebagai mitra sekolah komite sekolah harus bisa menjalankan perannya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk masa yang akan datang. Namun kenyataannya dilapangan para anggota komite belum menjalankan perannya dengan baik.

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan oleh penulis mengenai pelaksanaan peran komite di ssekolah, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan peran komite di sekolah sebagai berikut:

1. Masih kurang pahamnya komite terhadap tugas sebagai badan pertimbangan.
2. Komite sekolah kurang menanggapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh orang tua murid terhadap pelaksanaan program-program sekolah.
3. Terkadang komite sekolah tidak menjalankan perannya sebagai badan pendukung, contohnya pada pengelolaan sumberdaya manusia, komite tidak memantau kondisi tenaga pendidikan di sekolah.
4. Komite sekolah jarang membantu sekolah guna untuk mendapatkan bantuan dari pengusaha ataupun pihak donatur lainnya sehingga sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang hanya diharapkan pendanaanya dari pemerintah saja.

5. Komite sekolah sering disebut sebagai tukang stempel oleh orang tua murid dan masyarakat, itu semua karena komite sekolah tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Peran Komite Sekolah di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging yang dilihat dari persepsi guru yang meliputi peran sebagai (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan, (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seperti apa persepsi guru tentang Pelaksanaan Peran Komite Sekolah pada SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging? Yang meliputi : (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan, (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

E. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah dalam hal *advisory agency* (pemberi pertimbangan) di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging?
2. Bagaimana Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah dalam hal *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan) di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging?
3. Bagaimana Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah dalam hal *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging?
4. Bagaimana Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah dalam hal mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah) di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dari peneliti ini adalah untuk memperoleh informasi tentang :

1. Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan)

2. Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan).
3. Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan).
4. Persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan peran komite di sekolah khususnya di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging.

2. Manfaat praktis

a) Komite

Sebagai masukan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan informasi bagi anggota komite seperti apa persepsi guru terhadap pelaksanaan perannya di sekolah.

b) Kepala sekolah

Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah bagaimana seharusnya peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

c) Pembaca

Untuk menambah bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan peran komite di sekolah.

d) Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami serta mempelajari secara khusus tentang pelaksanaan peran komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging.

BAB II

KJIAN TEORI

A. Pengertain Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah persepsi diartikan sama dengan tanggapan. Poerwadarmita (1990:240), menjelaskan istilah persepsi diartikan sebagai suatu yang di serap, diterima dengan cara panca indra, seperti melihat, mendengar merasai ataupun sering diterjemahkan sebagai bayangan dalam angan-angan, pendapat pemandangan, sebutan atau reaksi yang pada hakikatnya mengarah kepada apa yang ditanggapinya melalui panca indra terbayang dalam angan-anganya.

Persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *perception* yang berarti sebagai tanggapan atas daya memahami sesuatu. Ada bermacam-macam pengertian mengenai persepsi, Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensori stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.

Menurut Walgito (2010:99) persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat

penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapaan, kulit pada telapak tangan sebagai alat peraba yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Adapun Thoha mengatakan (2008:141) “Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman”.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013:236) dalam bukunya yang berjudul “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” dijelaskan bahwa “Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau respon seorang individu terhadap sesuatu.

B. Pengertian Komite Sekolah

Dalam Kepmen (2002:7) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik

pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa “Komite sekolah/ sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan”.

Sedangkan dalam PP No 17 Tahun 2010 kedudukan ini tidak berubah, artinya bahwa komite sekolah tetap sebagai lembaga yang mandiri dibentuk guna mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemberdayaanya dalam PP No 17 tahun 2010 ini disebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus professional artinya komite sekolah harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah, atau bahkan menjadi “tukang stempel” atas kebijakan kepala sekolah.

Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekoah, Dewan Sekolah, Majelias Sekolah, Majelis

Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai paduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 004/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah

Manurut Hasbullah (2006:95), pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Pengembangan pendidikan secara lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak terkait (stakeholder) pendidikan.

Konsep perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung didalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait dimana posisinya dan apa manfaatnya.

Dalam Depdiknas (2002:15) di sini diterangkan bahwa posisi komite berada ditengah-tengah antara orang tua murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta disatu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah dipihak lainnya. Sedangkan komite sekolah menjembatani kepentingan dari kedua belah pihak tersebut.

Engkoswara (2011:297) mengemukakan komite adalah Lembaga/ Badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dewan sekolah / komite sekolah terdiri dari unsur-unsur : wakil orang tua siswa, wakil guru-guru kepala sekolah wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha /industri wakil pemerintah daerah dan wakil pejabat pengendali pendidikan.

Menurut Satori dalam Mulyono (2009:58) mengemukakan komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah.

Komite sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai forum untuk mempresentasikan segala aspirasi, prakarsa dan partisipasi para stakeholder sekolah secara professional. Forum ini dapat mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan lembaga sekolah dalam hal: (1) penyusunan perencanaan stratejik sekolah: (2) penyusunan perencanaan tahunan sekolah: (3) mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan , masalah, aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota dewan sekolah: (4) memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pegadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan komtitif dan kompratif

sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah: (5) mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school selfassessment*) dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum dewan sekolah: (6) membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/ intuisi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (*basic minimum competency*) seperti yang diatur dalam PP No 25 tahun 2000 (7) membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan dewan komite : (8) memantau kinerja sekolah yang meliputi, kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan tata tertip sekolah, prestasi baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.

Menurut Satori dalam Sagala (2005:7) komite sekolah merupakan patner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah. Dan Menurut Bedjo Sujanto (2007:61) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemeratan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua murid atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya peran komite sekolah dapat membantu mempercepat atau memberikan pemahaman

kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kepekaan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat (Suryadi, 2003). Komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam upaya membangun komitmen dan loyalitas serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Sapari (2003:38) menerangkan bahwa komite sekolah harus mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara organisasi maupun perorangan. Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia dalam meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Pemberdayaan komite sekolah adalah membuat orang-orang yang duduk sebagai pengurus dan anggota komite menjalankan perannya untuk membantu

penyelenggaraan pendidikan. Misalnya memobilisasi dana masyarakat ataupun dalam bentuk sumbangan lainya seperti memberikan pertimbangan dan pemikiran.

Penyelenggaraan pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dengan memacu pada standar pelayanan minimal meliputi: kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah dan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat disekolah sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan dimasa sekarang dan akan datang.

Pemberdayaan komite sekolah adalah suatu pengaturan atau pemanfaatan potensi yang ada pada badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan.

Sagala (2011:191) menyatakan peran serta manajemen sekolah adalah yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, dimana agar peran serta masyarakat menjadi suatu system yang terorganisasi dengan baik.

Menurut Mulyasa (2005:105) keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perwakilan orang tua/ wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
- 2) Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK. kepala dusun, ulama, buadayawan, pemuka adat).
- 3) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 4) Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
- 5) Dunia usaha/ industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
- 6) Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- 7) Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
- 8) Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP, SMU, SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
- 9) Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ ART.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan pengertian komite sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai forum untuk mempresentasikan segala aspirasi, dan partisipasi seluruh stakeholder sekolah dan masyarakat secara professional, demi meningkatkan mutu pendidikan,

C. Peran Komite Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 02 April dalam Keputusan Mendikns dinyatakan bahwa peran komite sekolah merupakan :(1) *advisory agency* (pemberian pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah sebagai *Advisory agency* (pemberi pertimbangan)

Depdiknas (2002:12) menguraikan perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite sekolah mempunyai fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan. Fungsi tersebut itu dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan. Hal ini penting sebab di era otonomi sekarang ini partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu sebagai badan atau lembaga yang non

struktural, komite sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan dalam mengali berbagai aspirasi masyarakat tersebut, yang kemudian setelah diolah dan dianalisis kenyataanya secara objektif, akan menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pendidikan (dinas pendidikan kabupaten/kota) dalam merumuskan berbagai program pendidikan.

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan melaksanakan program seperti perencanaan sekolah memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengesahan RAKS, menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, orang tua siswa dan masyarakat) maupun memberikan pertimbangan tentang perubahan RAPBS. Dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. Yang kedua dalam pelaksanaan program, dengan memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran kepada guru. Peran yang ketiga adalah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, tentang saran prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah serta anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Pertimbangan yang diberikan oleh komite berbentuk dukungan kepada orang tua siswa. Contohnya: pihak sekolah ingin menaikkan uang SPP siswa sedangkan kondisi orang tua siswa yang menengah kebawah pasti melakukan penolakan, disinilah pihak komite memberikan

pertimbangan kepada kepala sekolah, sepertinya lebih baik uang komite tidak di naikan tapi orang tua siswa lancar atau tepat waktu dalam pembayarannya, dan kalau uang SPP siswa dinaikan pembayarannya akan mengalami kemacetan dan sekolah juga yang terganggu. Dengan adanya pertimbangan seperti itu maka kepala sekolah menerima pertimbangan tersebut. Maka dari itu peran komite sebagai pertimbangan itu memang sangat dibutuhkan bagi orang tua siswa, dan apapun keputusan yang akan diambil oleh pihak sekolah sudah memang seharusnya di diskusikan dulu bersama komite.

Selanjutnya Sapari (2003:28) komite sekolah memberikan pertimbangan tentang pengelolaan sumberdaya pendidikan, jumlah jam mengajar perminggu, besarnya jumlah honor perjam. Komite sekolah memberikan kepentingan sekolah terlebih dahulu baru kepentingan guru dan yang lainnya. Komite sekolah juga mempertimbangan kepada kepala sekolah tenaga kependidikan yang diperbantukan disekolah. Dimana komite harus tau dan menyetujui tenaga honorer yang diperbantukan disekolah apakah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, pertimbangan yang diberikan oleh komite bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh kepala sekolah.

Depdiknas (2002:13) dalam kegiatannya peran komite sekolah selaku pemberi pertimbangan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

- a) Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat.

- b) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah.
- c) Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah.
- d) Menyampaikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan kepala dinas pendidikan dan dewan pendidikan.
- e) Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan.
- f) Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan peran dan fungsi komite sekolah disebabkan pihak satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah belum sepenuhnya memberikan keluasaan ataupun kepercayaan penuh kepada komite sekolah dalam mengelola anggaran.

2. Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan)

Dalam Kepmen (2002:7) diuraikan bahwa komite sekolah dalam prakteknya dapat memberikan dukungan berupa upaya mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dilihat pula

komite sekolah mengalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dengan menyampaikan terlebih dahulu program sekolah dan program komite sekolah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dan guru merupakan bentuk dukungan yang sangat perlu dikembangkan oleh komite sekolah. Semua dukungan tersebut tidak terlepas dari mekanisme penyampaian melalui lembaga komite sekolah.

Engkoswara (2011:300) komite sekolah perannya sebagai badan pendukung mempunyai tiga peranan yaitu: pengelolaan sumber daya manusia, yang meliputi: memantau kondisi tenaga pendidikan di sekolah, memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah dan memobilisasi tenaga kependidikan non PNS untuk mengisi kekurangan guru di sekolah.

Peran yang kedua adalah pengelolaan sarana prasarana yang meliputi: memantau kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah, mengkoordinasi dukungan sarana prasarana sekolah dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana prasarana sekolah.

Peran yang ketiga pengelolaan anggaran yang meliputi: memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan

dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

3. Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan)

Engkoswara (2011:301) peran komite sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) mempunyai tiga peranan, pertama mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah. Dalam peranan yang pertama ini dengan mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah, pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Komite sekolah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui oleh komite setiap saat, memantau proses belajar siswa apa perlu diadakan pelajaran tambahan, memantau keadaan siswa yang patut dibantu. Komite juga memantau kegiatan ekstrakurikuler siswa seperti kegiatan osis, pramuka, dan lain sebagainya.

Peran kedua memantau pelaksanaan program sekolah dengan organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Peran yang ketiga komite sebagai badan pengontrol adalah memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang sekolah dan memantau angka bertahan sekolah. Dalam hal perencanaan sekolah, komite juga harus bisa mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan, serta pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Menurut Ihsan (2003:104) peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain terutama dalam pengawasan, masyarakat terlibat dalam pengawasan terhadap sekolah (*social control*). Pengawasan terhadap segala gerak-gerik sekolah selaku lembaga pendidikan, pengawasan dapat dilakukan secara langsung atau lewat komite sekolah atau lewat masyarakat. Dengan demikian kegiatan pengawasan merupakan control terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun lembaga.

Peran selaku pengontrol, komite sekolah harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Meninta penjabaran kepada kepala sekolah tentang hasil belajar siswa.
- b) Menyebarkan koesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari orang tua maupun masyarakat.
- c) Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatan komite terhadap sekolah.

4. Peran komite sekolah sebagai mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi anantara masyarakat dengan pemerintah)

Komite sekolah sebagai badan mediator (penghubung) mempunyai tiga peranan yaitu sebagai penghubung dalam perencanaan, yaitu menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat komite sekolah dengan sekolah dan sekolah dengan dewan pendidikan. Selanjutnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, dan membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. Komite sekolah sebagai badan penghubung di peranan perencanaan sekolah, komite sekolah harus menjalankan peranannya artinya keputusan yang dihasilkan saat rapat itu merupakan aspirasi orang tua siswa dan aspirasi masyarakat bukan keinginan sekolah.

Peranan yang kedua adalah pelaksanaan program sekolah. Dalam hal ini meliputi: mensosialisaikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah dan yang terakhir mengkounikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah.

Peran yang ketiga sebagai penghubung adalah pengelolaan sumberdaya pendidikan hal ini meliputi: mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan yang diberikan masyarakat.

Dari empat peran komite diatas peneliti melihat dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, ini menunjukkan bahwa pengurus komite sekolah belum memahami dan menjalankan peranya dengan sebaik-baiknya.

D. Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam kontes sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaanya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan msyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dan masyarakat yang diwadahi oleh komite sekolah, belum tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:

1. Orang tua dan masyarakat membantu penyediaan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.
2. Orang tua memberikan nformasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya, supaya pihak sekolah dapat mewadahi potensi yang dimiliki sianak tadi.
3. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaan yang harus diarahkan kepada peningkatan kemampuan seluruh personil sekolah adalah:

1. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
2. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
3. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan disekolah.
4. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
6. Mengikut sertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat yang berjalan dengan baik akan bermanfaat pada kedua pihak. Berikut manfaat yang diperoleh:

1. Bagi masyarakat
 - a) Masyarakat mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah.
 - b) Masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan dapat mengajukan aspirasi terhadap sekolah.

- c) Masyarakat dapat memberikan kritikan dan saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program, keputusan atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

2. Bagi sekolah

- a) Sekolah dapat termovasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidik maupun dari segi fasilitas pendidikan karena sekolah akan mendapat penilaian dan kontrol langsung dari masyarakat.
- b) Sekolah dapat menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah kepada masyarakat, dan memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk menyelesaikannya.
- c) Sekolah dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep-konsep pendidikan yang perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman konsep antara sekolah dengan masyarakat.
- d) Sekolah dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar bagi peserta didik.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap pendidikan terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan

berakar budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

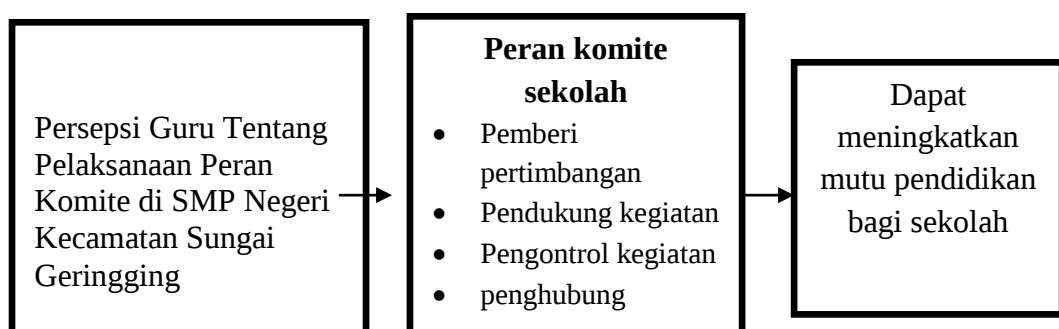
Adapun tujuan dari dibentuknya komite sekolah ini adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.

E. Kerangka Konseptual.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan disekolah. Sesuai uraian diatas bahwa persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite sekolah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka konseptual persepsi guru tentang pelaksanaan peran komite SMP Negeri Kecamatan Sungi Geringging.



BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebagai badan Pertimbangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik yaitu 3,32. Berarti komite sekolah telah melaksanakan perannya dalam memberikan masukan dan pertimbangan tentang perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan sumber daya pendidikan sudah terlaksana dengan cukup baik tetapi harus ditingkatkan lagi.
2. Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan pendukung kegiatan layanan pendidikan menunjukkan berada pada kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,23. Namun hal ini harus ditingkatkan lagi.
3. Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Pengontrol kegiatan layanan pendidikan menunjukkan bahwa berada pada kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,35. Hal ini berarti komite sekolah telah melakukan pengontrolan perencanaan pendidikan, memantau pelaksanaan program sekolah dan memantau output pendidikan serta menilai pengelolaan sekolah dengan cukup baik.

4. Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Peran Komite di SMP Negeri Kecamatan Sungai Geringging sebagai badan Penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah menunjukan berada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,45. Dalam hal ini komite sudah menjalankan perannya dengan cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar mutu pendidikan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka penulis menyarankan yakni agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan bisa menjalankan perannya dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan kedepannya. Berikut beberapa saran yang penulis sampaikan yakni bagi:

1. Bagi kepala sekolah, seharusnya kepala sekolah dapat lebih memberdayakan komite sekolah dalam melaksanakan perannya.
2. Bagi komite sekolah seharusnya dapat meningkatkan pemahamannya terhadap tugas pokok dan perannya agar dapat melaksanakan perannya tersebut dengan baik yang mana perannya dapat memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan terhadap segala kebijakan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan serta dapat menjadi mediator (penghubung) atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pihak sekolah dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Kepada pihak sekolah agar mengikutsertakan pengurus komite dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi pendidikan yang sesuai dengan peran komite sekolah.
4. Kepada pihak sekolah komite harus dilibatkan secara penuh mulai dari perencanaan program akan sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan dan kemajuan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah: Mewujudkan Sekolah-Sekolah Yang Mandiri dan Otonom, <http://www/depdiknas.go.id>.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bedjo, Sujanto. 2007. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Jakarta: Sagung Seto
- Danim, Sudarwan. 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Darmadi, Hamid. 2013. Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial. Bandung : Alfabeta
- Depdiknas, 2001. Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan berbasis Sekolah(Buku 1). Jakarta:Depdiknas
- Depdiknas, 2002. Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite soklah. Jakarta: Dirjen Mendikdamen.
- Engkoswara, 2011. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah, 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Mulyono. 2009. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, 2012. Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Asara.
- PP No 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Rivai, Veithzal & Deddy, Mulyadi (2012). *Kepemimpinan dan Perlaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada